



RANHIR RENJA

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		ii
KATA PENGANTAR		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	6
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	14
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	18
	2.4 <i>Review</i> Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB III	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	29
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	29
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	29
	3.3 Program dan Kegiatan	31
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	36
BAB V	PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Pegawai Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Tabel 2.2	Program/Kegiatan Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2022	7
Tabel 2.3	Pengukuran Kinerja Utama Bappeda Kab. Kep. Anambas	10
Tabel 2.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA dan Pencapaian Renstra BAPPEDA s/d Tahun 2023	11 9
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kab. Kep. Anambas	17
Tabel 2.6	<i>Review</i> Terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2024	20
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2024	31
Tabel 3.2	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Bappeda 2024	32
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kab. Anambas Tahun 2024	36



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala berkat dan rahmat Nya, sehingga penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Kep. Anambas Tahun 2024 telah selesai disusun.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 pasal 21 ayat 3, bahwa Rancangan Akhir Renja PD dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada rancangan akhir RKPD. Rancangan Akhir Renja akan berfungsi sebagai alat dalam mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sesuai dengan fungsinya, maka rencana kerja, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang termuat dalam Renja harus bersifat terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Selanjutnya, dengan telah tersusunnya dokumen Rancangan Akhir Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2024, dapat dilihat sejauh mana kinerja OPD dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi prioritas bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Dalam penyusunan dokumen Rancangan Akhir Renja ini, kami menyadari masih terdapat kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan, untuk itu saran dan masukan semua pihak yang bersifat konstruktif.

Tarempa, 20 Juni 2023

KEPALA BADAN,



ANDY SUNA KHASIBUAN, ST
Pembina Tk.I

NIP. 19820701 201001 1 019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. PD menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap perangkat daerah untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas disusun berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kab. Kep. Anambas, Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas serta berpedoman pada Renja Kementerian PPN/Bappenas dan Renja Bappeda Prov. Kep. Riau.

Proses penyusunan Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2024 disusun secara simultan dengan penyusunan Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2021-2026 yang merujuk dari rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Kep. Anambas, agar program/ kegiatan/ sub kegiatan yang disusun benar-benar menjawab permasalahan dan isu strategis yang ada. Disamping itu, penyusunan program/ kegiatan/ sub kegiatan juga telah memperhatikan program prioritas

pembangunan dalam RKPD Tahun 2024. Sebagaimana diketahui, tahun 2024 merupakan tahun ke-4 (empat) perencanaan pembangunan Kab. Kep. Anambas yang berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dimana visi yang hendak dicapai yaitu : “Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah II”.

Selanjutnya Renja PD dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan akan bertransformasi menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Kep. Anambas.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031

- (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.
 16. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 480);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2024 ialah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2024 adalah :

- a. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional;
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
- c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Memuat pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, *review* terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, serta program, kegiatan dan sub kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menguraikan tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang berisi indikator, pagu indikatif dan pagu prakiraan maju tahun depan.

Bab V Penutup

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Dalam pelaksanaan Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas pada tahun 2024, implementasi terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) menjadi hal yang sangat krusial, guna mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, yang tujuannya untuk mewujudkan anggaran yang berkeadilan. Hal tersebut diatas juga menjadi *"concern"* tersendiri di lingkungan Bappeda Kab. Kep. Anambas. Adapun kondisi pegawai di lingkungan Bappeda Kab. Kep. Anambas pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2023
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jumlah
1.	Laki-Laki	37 Orang
2.	Perempuan	27 Orang
	Jumlah	64 Orang

Dari tabel diatas, kondisi pegawai Bappeda Kab. Kep. Anambas pada tahun 2023 adalah sejumlah 64 orang, yang terdiri dari 37 orang pegawai laki-laki dan 27 orang pegawai perempuan. Pelaksanaan Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas pada tahun 2023 telah dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi kesenjangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Pada tahun 2022, Bappeda Kab. Kep. Anambas melaksanakan 2 urusan, 4 program, 15 kegiatan dan 58 sub kegiatan. Adapun program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2022		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,742,383,373	8,691,980,680	99.42
5.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24,155,000	24,073,800	99.66
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9,745,000	19,668,550	99.61
	02 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,410,000	4,405,250	99.89
5.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,814,495,654	4,804,274,398	99.79
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,791,785,654	4,781,570,598	99.79
	02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22,710,000	22,703,800	99.97
5.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64,763,000	63,816,351	99
	01 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	64,763,000	63,816,351	98.54
5.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,301,497,400	1,287,709,543	795
	01 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158,976,900	155,829,020	98.02
	02 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	106,960,000	105,802,045	98.92
	03 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14,372,000	14,323,800	99.66
	04 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49,178,000	49,093,540	99.83
	05 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85,596,000	85,410,010	99.78
	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	420,000	420,000	100.00
	07 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	699,994,500	690,831,128	98.69
	08 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	186,000,000	186,000,000	100.00
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	456,784,500	453,736,100	99.33
	01 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	456,784,500	453,736,100	99.33
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,003,390,844	1,983,161,788	292.89
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	5,000,000	100.00
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126,630,900	118,438,448	93.53

	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,871,759,944	1,859,723,340	99.36
5.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77,296,975	75,208,700	195.61
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48,370,475	46,333,700	95.79
	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28,926,500	28,875,000	99.82
5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	455,852,880	452,735,885	298.41
5.01.02.2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	280,248,800	278,317,787	99.31
	01	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	146,414,400	144,552,587	98.73
	02	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	113,829,400	113,760,200	99.94
	03	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	19,330,000	19,330,000	100.00
	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	675,000	675,000	100.00
5.01.02.2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	31,976,040	31,943,146	99.90
	01	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	31,976,040	31,943,146	99.90
5.01.02.2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	143,628,040	142,474,952	99.20
	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	143,628,040	142,474,952	99.20
5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	502,453,027	498,989,121	297.17
5.01.03.2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	227,297,343	226,966,377	99.85
	01	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	21,885,000	21,868,300	99.92
	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	83,340,682	83,270,579	99.92
	03	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	43,002,550	42,958,400	99.90
	04	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	61,090,105	60,990,098	99.84
	05	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	17,979,006	17,879,000	99.44

5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		93,419,674	91,571,448	98.02
	01	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20,788,661	20,788,490	100.00
	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30,705,013	29,314,808	95.47
	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	17,200,000	17,183,000	99.90
	04	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6,328,800	6,326,050	99.96
	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12,747,200	12,741,600	99.96
	06	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5,650,000	5,217,500	92.35
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		181,736,010	180,451,296	99.29
	01	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	16,984,600	16,966,150	99.89
	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	45,075,027	43,899,524	97.39
	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20,250,000	20,160,000	99.56
	05	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	80,774,600	80,774,600	100.00
	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12,001,283.00	12,000,522	99.99
	06	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6,650,500.00	6,650,500	100.00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		11,286,600.00	11,238,450	99.57
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		11,286,600	11,238,450	99.57
	01	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	11,286,600	11,238,450	99.57
Jumlah			9,711,975,880	9,654,944,136	

Realisasi pelaksanaan program/kegiatan sebesar Rp.9.654.944.136,- atau 99,41% dari total anggaran sebesar Rp.9.711.975.880,. Selanjutnya, Pengukuran Kinerja Utama Bappeda Kab. Kep. Anambas sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Utama Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Tingkat Ketercapaian (%)
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	Indeks Perencanaan	91,33	86,66	94,88
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Bappeda Kab.Kep.Anambas	Indeks RB Bappeda	59 (CC)	65,59 (B)	111
Mewujudkan layanan penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	29,17	28,57	97,94

Pengukuran kinerja Bappeda Kab. Kep. Anambas diukur dalam 3 sasaran strategis dan 3 Indikator kinerja yaitu Indeks Perencanaan dengan tingkat ketercapaian 94,88%, Indeks RB Bappeda dengan tingkat ketercapaian 111%, Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah dengan tingkat ketercapaian 97,94%. Selanjutnya, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas tahun 2022 dan pencapaian Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas sampai dengan tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA dan Pencapaian Renstra BAPPEDA s/d Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA 2022) (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2022 (%)	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
5	01	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100	100	100	100	100	100	100	100
5	01	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100
5	01	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
5	01	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE	100	100	100	100	100	100	100	100

5	01	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
5	01	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya	100	100	100	100	100	100	100	100
5	01	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah berkategori baik	80	100	80	100	100	80	93	100
5	01	02			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah									
5	01	02	2	01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu dan sesuai konten	100	100	80	100	10	80	100	100
5	01	02	2	02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data untuk perencanaan	80	100	80	100	100	80	93	100
5	01	02	2	03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator kinerja sasaran daerah pada RPJMD yang dievaluasi capaian realisasinya	78	100	80	100	100	80	93	100
5	01	03			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah									
5	01	03	2	01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100	100	100	100	100	100	100	100
5	01	03	2	02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat	100	100	100	100	100	100	100	100

						daerah bidang perekonomian dan SDA								
5	01	03	2	03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	100	100	100	100	100	100	100	100
5	05	02			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah									
5	05	02	2	03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan	65	100	100	100	100	100	100	100

Jumlah Program : 4 Program

Jumlah kegiatan : 14 Kegiatan



Penjelasan dari tabel 2.4 diatas adalah terdapat 4 (empat) program dan 14 (empat belas) kegiatan sebagaimana pelaksanaan terhadap Renstra Bappeda tahun 2021-2026. Sebanyak 14 kegiatan memiliki tingkat pencapaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda tahun 2021-2026.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dalam pelaksanaannya, Bappeda Kab. Kep. Anambas menyelenggarakan 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan. Dalam proses perencanaan, Bappeda Kab. Kep. Anambas selalu mengedepankan pendekatan pembangunan yang responsif *gender*, dimana pertimbangan terhadap kebutuhan aspirasi baik laki-laki maupun perempuan selalu menjadi perhatian khusus. Upaya tersebut dilakukan dengan pelaksanaan verifikasi mendalam terhadap Renja PD di Kab. Kep. Anambas yang dilakukan dengan metode *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS). Pada tahun 2022 Bappeda Kab. Kep. Anambas telah melaksanakan 4 (empat) program dan 14 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut:

1. Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program berisi 7 (tujuh) kegiatan yang memiliki capaian indikator pada sebesar 100%.

2. Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah merupakan program yang berisi 3 (tiga) kegiatan yang memiliki capaian indikator sebesar 100%.

3. Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan program yang berisi 3 (tiga) kegiatan yang memiliki capaian indikator sebesar 100%.

4. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan

Program penelitian dan pengembangan daerah merupakan program yang berisi 1 (satu) kegiatan yang memiliki capaian indikator sebesar 100%.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kab. Kep. Anambas

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD (%)						Realisasi Capaian (%)		Proyeksi Capaian (%)		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Indikator Kinerja Kunci													
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
4.	Penjabaran Program RPJMD Ke dalam RKPD		100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Indikator Kinerja PD													
1.	Capaian Kinerja Perencanaan			85	87	90	91	93	88	89	91	93	95	
2.	Capaian Tindak Lanjut Kerjasama													
3.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100	100	100	100	100	100	100				
4.	Capaian Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kondisi Baik			90	95	100			92	96				
5.	Capaian Peningkatan Kapasitas Pegawai Di PD			100	100	100			100	100				
6.	Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja			20	20	20			20	20				

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappeda Kab. Kep. Anambas memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bappeda Kab. Kep. Anambas memberikan layanan dalam proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda Kab. Kep. Anambas memberikan layanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, serta melakukan pembinaan di bidang perencanaan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Bappeda Kab. Kep. Anambas selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah menghadapi permasalahan dan isu-isu penting sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif;
2. Belum optimalnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain, DPRD, LSM, lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta;
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan secara sistematis dan akurat;
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
5. Belum optimalnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
6. Belum optimalnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.
7. Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)

Permasalahan dan isu penting diatas secara tidak langsung akan memberikan dampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta capaian program nasional, seperti SPM dan SDG's. Untuk itu, optimalisasi terhadap pelaksanaan program/ kegiatan/

sub kegiatan perlu dilakukan guna mempercepat pencapaian target dan indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya penghapusan terhadap program/ kegiatan/ sub kegiatan yang dianggap tidak memberikan kontribusi positif perlu dilakukan agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas akan memperhatikan pembangunan yang bersifat lintas sektor seperti implementasi Kabupaten layak anak yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak-hak anak sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak dan penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat memperhatikan suatu Kabupaten yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kondisi gagalnya pertumbuhan tubuh dan otak pada anak akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berfikir yang disebut dengan *stunting*, dalam hal ini pemerintah di Kabupaten Anambas memperhatikan perencanaan dalam pencegahan stunting dengan prevelensi stunting tahun 2021 sebesar 15,8% menurun menjadi 6,48% pada tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dukungan pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas terkait *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan yaitu dalam mengambil kebijakan perencanaan program dan anggaran sebagai upaya mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial dan mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dengan perencanaan pembangunan inovatif yang bersifat holistic-tematik, integratif dan spasial untuk diintegrasikan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Organisasi Perangkat Daerah wajib untuk mengembangkan kreatifitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini Bappeda Kab. Kep. Anambas membuat suatu inovasi perencanaan pembangunan yang terintegrasi, berkesinambungan dan smart pemerintah daerah, dengan pembuatan Aplikasi Sepintas agar pembangunan di Kab. Kep. Anambas kedepannya lebih terintegrasi dan smart.

Agenda kegiatan Tahun 2024 akan difokuskan pada pelaksanaan inovasi daerah, mengingat pada Tahun 2022 Kab. Kep. Anambas masih memiliki beberapa catatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil dari rilis Kementrian Dalam Negeri bahwa Kab. Kep.

Anambas dikategorikan sebagai daerah yang kurang inovatif. Penekanan terhadap implementasi inovasi daerah menjadi konsen bagi berbagai pihak di Kab. Kep. Anambas.

Pelaksanaan Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan upaya-upaya dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai strategi untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan kontrol, serta memperoleh manfaat yang sama terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda Kab. Kep. Anambas dimasa yang akan datang, tantangan yang akan dihadapi Bappeda Kab. Kep. Anambas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah :

1. Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Persentase kemiskinan yang masih relatif tinggi;
3. Penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi di pasca pandemi *Covid-19*;
4. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Kab. Kep. Anambas Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Awal Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan, dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Bappeda. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
5.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	100%		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	100%	
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lingkup Bappeda	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	6 Dokumen	5,000,000	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lingkup Bappeda	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	6 Dokumen	24,200,000
	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lingkup Bappeda	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	5,000,000	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lingkup Bappeda	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	5,500,000
5.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya kinerja layanan administrasi keuangan	100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya kinerja layanan administrasi keuangan	100%	
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lingkup Bappeda	Persentase ASN yang dibayarkan gaji dantunjangan	100%	5,523,226,250	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lingkup Bappeda	Persentase ASN yang dibayarkan gaji dantunjangan	100%	5,838,835,631
	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lingkup Bappeda	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	5,000,000	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lingkup Bappeda	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	86,161,900
5.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Meningkatnya kapasitas pegawai sesuai tugas dan fungsi	100%		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Meningkatnya kapasitas pegawai sesuai tugas dan fungsi	100%	
	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Lingkup Bappeda	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	2 Stel	5,000,000	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Lingkup Bappeda	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	70 Stel	133,741,300
	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai yang dilaksanakan	1 Kali	5,000,000	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai yang dilaksanakan	5 Kali	225,798,100

5.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Meningkatnya kinerja layanan administrasi umum	100%		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya kinerja layanan administrasi umum	100%		
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lingkup Bappeda	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	5,000,000	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lingkup Bappeda	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	6,138,990
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lingkup Bappeda	Jumlah peralatan dan alat tulis kantor yangdiadakan	19 Jenis	5,000,000	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lingkup Bappeda	Jumlah peralatan dan alat tulis kantor yangdiadakan	19 Jenis	103,359,410
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lingkup Bappeda	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	24 Jenis	5,000,000	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lingkup Bappeda	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	24 Jenis	26,825,700
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lingkup Bappeda	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1965 Porsi	5,000,000	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lingkup Bappeda	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1965 Porsi	168,393,280
	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lingkup Bappeda	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yangtersedia	5 Jenis	5,000,000	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lingkup Bappeda	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yangtersedia	5 Jenis	105,391,000
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Lingkup Bappeda	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	66 Eksemplar	5,000,000	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Lingkup Bappeda	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	66 Eksemplar	119,790,000
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lingkup Bappeda	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yangdihadiri	300 Kali	5,000,000	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lingkup Bappeda	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yangdihadiri	300 Kali	1,799,911,300
	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Lingkup Bappeda	Jumlah bulan dukungan pelaksanaan SPBE SKPD	12 Bulan	5,000,000	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Lingkup Bappeda	Jumlah bulan dukungan pelaksanaan SPBE SKPD	12 Bulan	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%		
	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Lingkup Bappeda	Jumlah kendaran perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan yang diadakan	4 Unit	5,000,000	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Lingkup Bappeda	Jumlah kendaran perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan yang diadakan	4 Unit	124,880,000
	05	Pengadaan Mebel	Lingkup Bappeda	Jumlah mebel yang diadakan	20 Unit	5,000,000	05	Pengadaan Mebel	Lingkup Bappeda	Jumlah mebel yang diadakan	20 Unit	200,000,000
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lingkup Bappeda	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	11 Jenis	5,000,000	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lingkup Bappeda	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	11 Jenis	515,998,000

	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lingkup Bappeda	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	2 Unit	457,584,000	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lingkup Bappeda	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	2 Unit	150,000,000
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Meningkatnya layanan penunjang apartur	100%		5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya layanan penunjang apartur	100%	
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lingkup Bappeda	Jumlah materai yang diadakan	750 Buah	5,000,000		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lingkup Bappeda	Jumlah materai yang diadakan	750 Buah
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lingkup Bappeda	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik	12 Bulan	134,154,858		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lingkup Bappeda	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik	12 Bulan
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lingkup Bappeda	Persentase PPKD, pengelola BMD dan pegawai tidaktetap yang dibayarkan honorariumnya	100%	1,047,102,600		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lingkup Bappeda	Persentase PPKD, pengelola BMD dan pegawai tidaktetap yang dibayarkan honorariumnya	100%
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Meningkatnya jumlah barang milik daerah berkondisi baik	80%		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya jumlah barang milik daerah berkondisi baik	80%	
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Lingkup Bappeda	Persentase kendaraan dinas yang terpelihara danmemiliki izin	70%	5,000,000		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Lingkup Bappeda	Persentase kendaraan dinas yang terpelihara danmemiliki izin	53,067,575
	05	Pemeliharaan Mebel	Lingkup Bappeda	Persentase mebel dalam kondisi baik	70%	5,000,000		05	Pemeliharaan Mebel	Lingkup Bappeda	Persentase mebel dalam kondisi baik	50,000,000
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lingkup Bappeda	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	29 Unit	5,000,000		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lingkup Bappeda	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	29 Unit
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			Meningkatnya kualitas perencanaan daerah	80%		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Meningkatnya kualitas perencanaan daerah	80%	
	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Lingkup Bappeda	Jumlah penyelenggaraan forum perangkat daerahkabupaten	2 Kali	5,000,000		04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Lingkup Bappeda	Jumlah penyelenggaraan forum perangkat daerahkabupaten	5,529,700
	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Lingkup Bappeda	Jumlah penyelenggaraan musrenbang kabupaten	2 Kali	5,000,000		05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Lingkup Bappeda	Jumlah penyelenggaraan musrenbang kabupaten	845,587,400

	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Lingkup Bappeda	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (kecamatan)	10 Kecamatan	5,000,000	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Lingkup Bappeda	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (kecamatan)	10 Kecamatan	75,649,760
	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah	6 Kali	5,000,000	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah	6 Kali	404,543,800
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Meningkatnya akses ketersediaan data dan informasi pemerintah daerah	80%		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Meningkatnya akses ketersediaan data dan informasi pemerintah daerah	80%	
	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Lingkup Bappeda	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan yang disusun	1 Dokumen	5,000,000	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Lingkup Bappeda	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan yang disusun	1 Dokumen	204,356,291
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	80%		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	80%	
	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	4 Kali	5,000,000	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	4 Kali	204,076,906
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			Meningkatnya kualitas perencanaan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			Meningkatnya kualitas perencanaan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	8 Kali	5,000,000	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	8 Kali	241,819,720

02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	5 Kali	5,000,000	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	5 Kali	86,484,380
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lingkup Bappeda	Jumlah monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	2 Kali	5,000,000	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lingkup Bappeda	Jumlah monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	2 Kali	39,869,500
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	2 Kali	5,000,000	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	2 Kali	19,800,000
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	6 Kali	5,000,000	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	6 Kali	165,763,680
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	5 Kali	5,000,000	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	5 Kali	121,044,680
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lingkup Bappeda	Jumlah monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	2 Kali	5,000,000	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lingkup Bappeda	Jumlah monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	2 Kali	61,377,250

	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia	2 Kali	5,000,000	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia	2 Kali	19,800,000
5.01.03.2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Meningkatnya kualitas perencanaan daerah bidang perekonomian dan SDA	100%			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Meningkatnya kualitas perencanaan daerah bidang perekonomian dan SDA	100%	
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	8 Kali	5,000,000	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	8 Kali	156,520,860
	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	5 Kali	5,000,000	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	5 Kali	50,525,970
	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Lingkup Bappeda	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Kali	5,000,000	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Lingkup Bappeda	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Kali	74,354,500
	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan perekonomian	2 Kali	5,000,000	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan perekonomian	2 Kali	19,800,000
	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lingkup Bappeda	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	5 Kali	5,000,000	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lingkup Bappeda	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	5 Kali	66,134,600

	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Lingkup Bappeda	Jumlah asistensi penyusunan dokumen perencanaan	5 Kali	5,000,000	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Lingkup Bappeda	Jumlah asistensi penyusunan dokumen perencanaan	5 Kali	14,660,360
	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Lingkup Bappeda	Jumlah monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	2 Kali	5,000,000	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Lingkup Bappeda	Jumlah monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	2 Kali	56,628,000
	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergita dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang SDA	2 Kali	5,000,000	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergita dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang SDA	2 Kali	19,800,000
5.01.03.2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Meningkatnya kualitas perencanaan daerah bidang infrastuktur dan kewilayahan	100%			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Meningkatnya kualitas perencanaan daerah bidang infrastuktur dan kewilayahan	100%	
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	9 Kali	5,000,000	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	9 Kali	143,520,860
	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	5 Kali	5,000,000	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	5 Kali	50,525,970
	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lingkup Bappeda	Jumlah monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	2 Kali	5,000,000	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lingkup Bappeda	Jumlah monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	2 Kali	74,354,500
	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang	2 Kali	5,000,000	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang	2 Kali	19,800,000

		Bidang Infrastruktur		infrastruktur				Bidang Infrastruktur		infrastruktur		
	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	2 Kali	5,000,000	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	2 Kali	85,974,600
	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	5 Kali	5,000,000	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	5 Kali	193,900,360
	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Lingkup Bappeda	Jumlah monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	10 Kali	5,000,000	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Lingkup Bappeda	Jumlah monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	10 Kali	53,784,500
	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang kewilayahan	2 Kali	5,000,000	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Lingkup Bappeda	Jumlah pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang kewilayahan	2 Kali	14,800,000
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dimanfaatkan	-	-	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dimanfaatkan	-	-
	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Lingkup Bappeda	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi bidang penyelenggaraan otonomi daerah	-	-	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Lingkup Bappeda	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi bidang penyelenggaraan otonomi daerah	-	-

5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan	-	-	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan	-	-	
	01	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Lingkup Bappeda	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan	-	-	01	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Lingkup Bappeda	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan	-	-
	02	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Lingkup Bappeda	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pariwisata	-	-	02	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Lingkup Bappeda	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pariwisata	-	-
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan	75%		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan	75%		
	01	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Lingkup Bappeda	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan lingkungan hidup	-	-	01	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Lingkup Bappeda	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan lingkungan hidup	-	-
	02	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Lingkup Bappeda	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan	-	-	02	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Lingkup Bappeda	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan	-	-
	03	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Lingkup Bappeda	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perhubungan	-	-	03	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Lingkup Bappeda	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perhubungan	-	-
	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Lingkup Bappeda	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang disusun	1 Dokumen	81,629,568	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Lingkup Bappeda	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang disusun	1 Dokumen	700,000,000

5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			Persentase pengembangan inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan	70%		Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase pengembangan inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan	70%	
	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Lingkup Bappeda	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-	-	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Lingkup Bappeda	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-
	02	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Lingkup Bappeda	Jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	1 Laporan	5,000,000	02	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Lingkup Bappeda	Jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	1 Laporan 5,000,000
Jumlah						7,498,697,276					16,374,406,645
Jumlah Program : 4 program							Jumlah Program : 4 program				
Jumlah Kegiatan : 17 Kegiatan							Jumlah Kegiatan : 17 Kegiatan				
Jumlah Sub Kegiatan : 65 Sub Kegiatan							Jumlah Sub Kegiatan : 65 Sub Kegiatan				

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2024 akan didiskusikan pada pelaksanaan forum PD/ lintas PD. Pembahasan pada diskusi tersebut dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD di Kecamatan. Pada kesempatan ini, dikarenakan proses perencanaan belum memasuki tahapan diatas, penelaahan usulan program/ kegiatan/ sub kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda Kab. Kep. Anambas baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD di lingkungan Kab. Kep. Anambas belum dapat dilakukan.



TUJUAN, SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Agenda pembangunan nasional menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas tahun 2024. Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 mengusung **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”**. Visi tersebut dijabarkan melalui 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Agenda pembangunan nasional selanjutnya dijabarkan secara lebih operasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kab. Kep. Anambas tahun 2021-2026 ialah **“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah II”**. Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Membangun sumber daya manusia yang kompetitif, sehat dan tangguh, berbudaya serta berakhlakul karimah;
2. Memulihkan dan membangun ekonomi kerakyatan yang ramah lingkungan, dan berbasiskan sektor perikanan dan pariwisata;
3. Menciptakan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan melayani serta otonomi desa yang bersinergi; dan
4. Melanjutkan pembenahan masalah air bersih, listrik, dan konektivitas wilayah.

Sebagaimana tugas dan fungsi Bappeda Kab. Kep. Anambas yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan bidang urusan perencanaan, dan penelitian dan pengembangan, penyusunan program/ kegiatan/ sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kab. Kep. Anambas ditujukan untuk mendukung misi ke-3 (tiga) yaitu "Menciptakan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan melayani serta otonomi desa yang bersinergi".

Berdasarkan RKPD Kab. Kep. Anambas tahun 2024, tema pembangunan yang diusung ialah : "Penguatan sumber daya manusia, ketahanan ekonomi, serta pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan". Dengan 4 rancangan prioritas pembangunan sebagai berikut :

- 1) Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing.,
- 2) Pengembangan dan pemantapan sumber daya ekonomi dan investasi daerah.,
- 3) Peningkatan Infrastruktur dasar dalam mendukung perekonomian daerah.,
- 4) Peningkatan tata kelola pemerintahan, stabilitas sosial, keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Pada penyusunan Renja Bappeda tahun 2024, keselarasan penyusunan Renja Bappeda terdapat pada prioritas ke empat yaitu tentang peningkatan tata kelola pemerintahan, stabilitas sosial, keamanan dan ketertiban di masyarakat. Untuk itu, agenda kerja Bappeda pada tahun 2024 akan diarahkan pada hal-hal demikian.

Memperhatikan hal diatas, kinerja Bappeda Kab. Kep. Anambas tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan (%)	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran (%)
1.	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis dan kredibel	Indeks perencanaan	92.7	Meningkatnya kualitas dan implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase sasaran RKPD yang konsisten dengan RPJMD	100
					Persentase program RKPD yang konsisten dengan RPJMD	100
					Persentase rekomendasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	78
2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Bappeda Kab. Kep. Anambas	Indeks RB Bappeda	B (64)	Manajemen tata kelola pemerintahan yang akuntabel di Bappeda Kab. Kep. Anambas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	78 (BB)
3.	Mewujudkan layanan penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	75.00	Memfasilitasi penerapan inovasi bagi perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	58,1

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Perumusan program/ kegiatan/ sub kegiatan di Bappeda Kab. Kep. Anambas didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya penelaahan terhadap visi dan misi kepala daerah, terutama pada misi ke-3, "menciptakan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan melayani serta otonomi desa yang bersinergi". Pada penyusunan Renja Bappeda tahun 2024, terdapat agenda penyusunan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) sebagaimana diketahui merupakan tahapan yang dilakukan pemerintah daerah dikarenakan periodisasi RPJP tahun 2005-2025 dipandang perlu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan untuk disusun dokumen RPJP periode 2026-2046.

Rancangan Teknokratik RPJMD (Rencana Program Jangka Menengah Daerah) disusun mengingat pada tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilihan Kepala

Daerah serentak. Rancangan Teknokratik disusun berdasarkan pertimbangan teknokratik, dimana teknokratik disusun oleh masing-masing OPD berdasarkan pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh setiap OPD dengan melibatkan tenaga ahli yang difasilitasi oleh Bappeda. Agenda tahun 2024 difokuskan juga kepada pelaksanaan inovasi daerah yang mengingat tahun 2022 Kab. Keb. Anambas dikategorikan sebagai daerah yang kurang inovatif. Penekanan inovasi pemerintah daerah menjadi konsen untuk ditingkatkan.

Pada tahun 2024 agenda kerja Bappeda juga turut memfokuskan dalam rangka dukungan rasional pekerjaan secara optimal, maka pelaksanaan pemindahan kantor dari Jl. Imam Bonjol Selayang Pandang ke Kantor di Jl. Raja Ali Haji Fisabilillah dipandang menjadi sangat penting, untuk itu sejumlah belanja akan difokuskan kepada belanja yang sifatnya mendukung pengadaaan ruang kantor yang representatif, maka pada penyusunan Renja Bappeda tahun 2024, mencakup 4 (empat) program, 17 kegiatan, dan 65 sub kegiatan, yaitu :

Tabel 3.2
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Bappeda 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024	
		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,563,020,302	
5.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110,755,000	APBD
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	92,905,000	APBD
	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17,850,000	APBD
5.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,703,226,250	
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,623,226,250	APBD
	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	80,000,000	APBD
5.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	375,590,000	APBD
	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	135,590,000	APBD
	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	240,000,000	APBD
5.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,854,494,900	APBD

	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17,732,000	APBD
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	183,976,900	APBD
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	79,389,000	APBD
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	174,413,000	APBD
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	115,400,000	APBD
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35,000,000	APBD
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	882,584,000	APBD
	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	366,000,000	APBD
5.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,549,326,219	APBD
	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130,000,000	APBD
	05	Pengadaan Mebel	1,275,960,119	APBD
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	485,782,100	APBD
	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	657,584,000	APBD
5.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,826,257,458	APBD
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30,000,000	APBD
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149,154,858	APBD
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,647,102,600	APBD
5.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143,370,475	APBD
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48,370,475	APBD
	05	Pemeliharaan Mebel	55,000,000	APBD
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,000,000	APBD
5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.535.937.200	
5.01.02.2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.083,270,100	APBD
	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	34,570,000	APBD
	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	708,450,200	APBD
	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	54,180,000	APBD

	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	286,069,900	APBD
5.01.02.2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	201,440,000	APBD
	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	201,440,000	APBD
5.01.02.2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	251,227,100	APBD
	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	251,227,100	APBD
5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.435.173.000	
5.01.03.2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	599,793,600	APBD
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	233,428,000	APBD
	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	57,004,800	APBD
	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	16,875,000	APBD
	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5,000,000	APBD
	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	148,928,000	APBD
	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	107,182,800	APBD
	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	26,375,000	APBD
	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5,000,000	APBD
5.01.03.2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	261,439,400	APBD
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	92,148,000	APBD
	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	49,351,600	APBD
	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	16,448,000	APBD

	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	5,000,000	APBD
	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	66,448,000	APBD
	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12,493,800	APBD
	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat DaerahBidang SDA	14,550,000	APBD
	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	5,000,000	APBD
5.01.03.2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	573,940,000	APBD
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	137,174,000	APBD
	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	49,781,600	APBD
	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	114,350,000	APBD
	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5,000,000	APBD
	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	56,448,000	APBD
	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	175,636,400	APBD
	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	30,550,000	APBD
	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	5,000,000	APBD
5.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	840,276,143	
5.05.02.2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	APBD
	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	-	APBD
5.05.02.2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	APBD
	01	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	-	APBD
	02	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	-	APBD
5.05.02.2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	835,276,143	APBD
	01	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	-	APBD

	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	-	APBD
	03	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	-	APBD
	04	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	-	APBD
	05	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	835,276,143	APBD
5.05.02.2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5,000,000	APBD
	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-	APBD
	02	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	5,000,000	APBD
		Jumlah	16.374.406.645	



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, & SUB KEGIATAN PRIORITAS KAB.KEP. ANAMBAS TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : BAPPEDA

JUMLAH PAGU : Rp. 16.374.406.645

SUMBER DANA : APBD KAB. KEP. ANAMBAS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
5.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	Lingkup Bappeda	100%		APBD	-	100%	
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Lingkup Bappeda	6 Dokumen	83,614,500	APBD	-	6 Dokumen	84,200,000
	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah yang disusun	Lingkup Bappeda	3 Laporan	16,065,000	APBD	-	3 Laporan	16,050,000
5.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Lingkup Bappeda	100%				100%	
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Lingkup Bappeda	26 Orang/Bulan	5,623,226,250	APBD	-	26 Orang/Bulan	5,838,835,631
	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Lingkup Bappeda	1 Dokumen	286,200,000	APBD	-	1 Dokumen	0

	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Lingkup Bappeda	2 Laporan	80,000,000	APBD	-	2 Laporan	86,161,900
5.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Lingkup Bappeda	100%		APBD		100%	
	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumla paket pakaian dinas beserta kelengkapannya	Lingkup Bappeda	64 Paket	135,590,000	APBD	-	64 Paket	133,741,300
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Lingkup Bappeda	26 Orang	228,000,000	APBD	-	26 Orang	225,798,100
5.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE	Lingkup Bappeda	100%		APBD		100%	
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Lingkup Bappeda	5 Paket	17,732,000	APBD	-	5 Paket	16,138,990
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Lingkup Bappeda	19 Paket	133,976,900	APBD	-	19 Paket	169,359,410
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Lingkup Bappeda	24 Paket	79,389,000	APBD	-	24 Paket	86,825,700
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Lingkup Bappeda	1965 Paket	124,413,000	APBD	-	1965 Paket	178,393,280
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Lingkup Bappeda	5 Paket	115,400,000	APBD	-	5 paket	125,391,000
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Lingkup Bappeda	66 Dokumen	16,584,515	APBD	-	66 Dokumen	119,790,000

	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Lingkup Bappeda	1 Laporan	882,584,000	APBD	-	1 Laporan	1,711,668,840
	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Lingkup Bappeda	12 Dokumen	366,000,000	APBD	-	12 Dokumen	325,060,000
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	Lingkup Bappeda	100%		APBD	-	100%	
	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Lingkup Bappeda	4 Unit	130,000,000	APBD	-	4 Unit	124,880,000
	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Lingkup Bappeda	20 Paket	689,760,119	APBD	-	15 Paket	774,649,890
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Lingkup Bappeda	13 Unit	285,782,100	APBD	-	13 Unit	415,998,000
	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Lingkup Bappeda	2 Unit	657,584,000	APBD	-	2 Unit	457,584,000
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya	Lingkup Bappeda	100%		APBD		100%	
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Lingkup Bappeda	12 Laporan	27,000,000	APBD	-	12 Laporan	32,100,000
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lingkup Bappeda	12 Laporan	149,154,858	APBD	-	12 Laporan	153,123,178
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Lingkup Bappeda	12 Laporan	1,647,102,600	APBD	-	12 Laporan	1,116,897,165
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah ber kondisi baik	Lingkup Bappeda	80%		APBD		80%	

	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	Lingkup Bappeda	22 Unit	43,533,427	APBD	-	22 Unit	63,067,575
	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Lingkup Bappeda	53 Unit	49,500,000	APBD	-	53 Unit	55,000,000
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Lingkup Bappeda	33 Unit	36,000,000	APBD	-	36 Unit	83,611,000
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH									
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu dan sesuai konten	Lingkup Bappeda	100%		APBD		100%	
	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah berita acara forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	Lingkup Bappeda	1 Berita Acara	34,570,000	APBD	-	1 Berita Acara	45,529,700
	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara musrenbang Kabupaten/Kota	Lingkup Bappeda	1 Berita Acara	508,450,200	APBD	-	2 Berita Acara	835,587,400
	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan	Lingkup Bappeda	10 Usulan	54,180,000	APBD	-	10 Usulan	65,649,760
	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan(RPJD/RPJMD/RKPD)	Lingkup Bappeda	1 Dokumen	886,069,900	APBD	-	1 Dokumen	304,543,800
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase ketersediaan data untuk perencanaan	Lingkup Bappeda	80%		APBD		80%	
	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	Lingkup Bappeda	34 Orang	201,440,000	APBD	-	34 Orang	209,356,291

5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase indikator kinerja sasaran daerah pada RPJMD yang dievaluasi capaian realisasinya	Lingkup Bappeda	80%		APBD		83%	
	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan Daerah	Lingkup Bappeda	5 Laporan	251,227,100	APBD	-	5 Laporan	224,076,906
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Lingkup Bappeda	100%		APBD		100%	
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Lingkup Bappeda	40 Dokumen	223,491,162	APBD	-	40 Dokumen	196,819,720
	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lingkup Bappeda	20 Laporan	57,004,800	APBD	-	20 Laporan	71,484,380
	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lingkup Bappeda	20 Laporan	16,875,000	APBD	-	20 Laporan	39,869,500
	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan	Lingkup Bappeda	1 Laporan	5,000,000	APBD		1 Laporan	19,800,000

	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lingkup Bappeda	8 Dokumen	141,481,600	APBD	-	8 Dokumen	155,763,680
	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lingkup Bappeda	4 Laporan	107,182,800	APBD	-	4 Laporan	111,044,680
	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lingkup Bappeda	4 Laporan	26,375,000	APBD	-	4 Laporan	61,377,250
	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia	Lingkup Bappeda	4 Laporan	5,000,000	APBD		4 Laporan	19,800,000
5.01.03.2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang perekonomian dan SDA	Lingkup Bappeda	100%		APBD		100%	
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya(RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Lingkup Bappeda	8 Dokumen	82,933,200	APBD	-	8 Dokumen	111,520,860
	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Lingkup Bappeda	4 Laporan	49,351,600	APBD	-	4 Laporan	50,525,970

	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Lingkup Bappeda	4 Laporan	16,448,000	APBD	-	4 Laporan	74,354,500
	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian	Lingkup Bappeda	1 Laporan	5,000,000	APBD		1 Laporan	19,800,000
	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Lingkup Bappeda	8 Dokumen	59,001,600	APBD	-	8 Dokumen	61,134,600
	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Lingkup Bappeda	4 Laporan	12,493,800	APBD	-	4 Laporan	14,660,360
	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Lingkup Bappeda	4 Laporan	14,550,000	APBD	-	4 Laporan	56,628,000
	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD bidang SDA	Lingkup Bappeda	1 Laporan	5,000,000	APBD		1 Laporan	19,800,000
5.01.03.2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	Lingkup Bappeda	100%		APBD		100%	

01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Lingkup Bappeda	6 Dokumen	127,237,162	APBD	-	6 Dokumen	131,520,860
02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lingkup Bappeda	3 Laporan	49,781,600	APBD	-	3 Laporan	56,525,970
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lingkup Bappeda	3 Laporan	114,350,000	APBD	-	3 Laporan	116,354,500
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Bidang infrastruktur	Lingkup Bappeda	1 Laporan	5,000,000	APBD	-	1 Laporan	19,800,000
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Lingkup Bappeda	6 Dokumen	56,448,000	APBD	-	6 Dokumen	60,974,600
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Lingkup Bappeda	3 Laporan	175,636,400	APBD	-	3 Laporan	215,636,400
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Lingkup Bappeda	3 Laporan	30,550,000	APBD	-	3 Laporan	53,784,500

			Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan							
	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan	Lingkup Bappeda	1 Laporan	5,000,000	APBD	-	1 Laporan	19,800,000
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dimanfaatkan	Lingkup Bappeda	-		APBD		-	
	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Lingkup Bappeda	1 Laporan	120,276,000	APBD	-	1 Laporan	150,000,000
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan	Lingkup Bappeda	75%		APBD		85%	
	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan lingkungan hidup	Lingkup Bappeda	1 dokumen	200,000,143	APBD	-	1 dokumen	230,000,000
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase pengembangan inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan	Lingkup Bappeda	-		APBD		-	
	03	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Lingkup Bappeda	1 Laporan	270,000,000	APBD	-	1 Laporan	300,000,000
Jumlah						16.071.597.336				16.787.849.146

Jumlah Program : 4 Program

Jumlah Kegiatan : 17 Kegiatan

Jumlah Sub Kegiatan : 65 Sub Kegiatan

BAB V

PENUTUP

Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Renstra tahun ke-4, periode tahun 2021-2026. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka pencapaian RPJMD Tahun 2021-2026. Selanjutnya, Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2024 akan dijadikan pedoman/acuan bagi Bappeda Kab. Kep. Anambas dalam menjalankan tugas dan fungsi PD. Keberhasilan dalam pelaksanaan Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2024 tentunya tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Bappeda Kab. Kep. Anambas serta peran aktif *stakeholders* dan masyarakat.

Tarempa, 20 Juni 2023

KEPALA BADAN,


ANDYOUNA K. HASIBUAN, ST

Pemimpin K.I.

NIP. 19820701 201001 1 019